



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.111, 2018

KEMEN-ATR/BPN. Satuan Biaya Keluaran Kegiatan.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, menetapkan Kementerian/Lembaga untuk menyusun suatu pedoman harga satuan pekerjaan sebagai dasar untuk menghitung harga satuan yang selanjutnya menghasilkan Harga Satuan Keluaran;

- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan diperlukan pedoman Harga Satuan Biaya Keluaran Kegiatan yang menghasilkan Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Satuan Biaya Keluaran Kegiatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBPN Pada Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks dalam rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBPN Pada Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 373);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 342);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 694).
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
3. Indeks Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran untuk menghasilkan satu volume keluaran *output* yang ditetapkan oleh Menteri di luar Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
4. Total Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran untuk menghasilkan total volume keluaran *output*.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berisi dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
6. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan program.
7. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) dari Kegiatan dalam satu program.
8. Kinerja adalah Prestasi Kerja berupa Keluaran (*Output*) dari suatu Kegiatan atau Hasil (*Outcome*) dari suatu Program dengan Kuantitas dan Kualitas terukur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menetapkan Satuan Biaya Keluaran Kegiatan sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian dalam

penyusunan RKA-K/L;

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan dokumen RKA-K/L yang tertib, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

BAB III

SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Satuan Biaya Keluaran Kegiatan di lingkungan Kementerian terdiri dari Indeks Biaya Keluaran Kegiatan dan Total Biaya Keluaran Kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-K/L, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dipergunakan untuk komponen Keluaran yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. dititikberatkan pada analisa biaya dari spesifikasi teknis masing-masing Keluaran.
- (2) Indeks Biaya Keluaran Kegiatan di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Indeks Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Perhitungan Rumus maka perhitungannya dilakukan sesuai dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan/atau
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan mengenai indeks dalam rangka penghitungan penetapan tarif pelayanan PNBP pada

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional.

- (4) Total Biaya Keluaran Kegiatan di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L di lingkungan Kementerian, Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Tahun 2018;
- b. referensi penyusunan prakiraan maju; dan
- c. bahan penghitungan pagu indikatif, pagu anggaran dan aagu alokasi anggaran Kementerian Tahun 2019.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Kegiatan berfungsi sebagai batas tertinggi;
- (2) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian bertanggung jawab atas penggunaan Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Kegiatan Tahun 2018 dalam pelaksanaan penyusunan RKA-K/L Kementerian Tahun 2018 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.
- (2) Pengawasan atas penggunaan Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Kegiatan Tahun 2018 dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA

RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN

2018

INDEKS BIAYA KELUARAN KEGIATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

No	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/Kategori	Volume	Indeks Biaya
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Titik Informasi Koordinat		1 Titik	40.000
2	Informasi Bidang Tanah Prona Sistematis Lengkap Kategori I	Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara	1 Bidang	156.000
3	Informasi Bidang Tanah Prona Sistematis Lengkap Kategori II	Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung	1 Bidang	130.500
4	Informasi Bidang Tanah Prona Sistematis Lengkap Kategori III	Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo	1 Bidang	106.000
5	Informasi Bidang Tanah Prona Sistematis Lengkap Kategori IV	Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung	1 Bidang	79.000
6	Informasi Bidang Tanah Prona Sistematis Lengkap Kategori V	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali	1 Bidang	53.000
7	Informasi Bidang Tanah Prona	Wilayah Kepulauan	1 Bidang	268.000

No	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/Kategori	Volume	Indeks Biaya
1	2	3	4	5
	Sistematik Lengkap Kategori VI			
8	Informasi Bidang Tanah Prona Sistematik Lengkap Kategori VII	Daerah Terpencil	1 Bidang	482.300
9	Pengukuran Batas Bidang Tanah (Kantah)		1 Bidang	Perhitungan Rumus
10	Pengukuran Massal (Kantah)		1 Bidang	Perhitungan Rumus
11	Pengembalian Batas (Kantah)		1 Bidang	Perhitungan Rumus
12	Pengukuran Batas Bidang Tanah (Kanwil)		1 Bidang	Perhitungan Rumus
13	Pengukuran Massal (Kanwil)		1 Bidang	Perhitungan Rumus
14	Pengembalian Batas (Kanwil)		1 Bidang	Perhitungan Rumus
15	Layanan Informasi Kutipan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)	Informasi Kutipan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)	1 Dokumen	11.600
16	Layanan Informasi Kutipan <i>Copy</i> Warkah	Informasi Kutipan <i>Copy</i> Warkah	1 Dokumen	62.600
17	Layanan Informasi Kutipan Denah Satuan Rumah Susun	Informasi Kutipan Denah Satuan Rumah Susun	1 Dokumen	15.200
18	Layanan Informasi Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)	Informasi Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)	1 Dokumen	19.600
19	Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Tim Peneliti Tanah	Tanah Pertanian	1 Bidang	Perhitungan Rumus
20	Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Tim Peneliti Tanah	Tanah Non Pertanian	1 Bidang	Perhitungan Rumus
21	Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Tim Peneliti Tanah Massal	Tanah Pertanian	1 Bidang	Perhitungan Rumus
22	Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Tim Peneliti Tanah Massal	Tanah Non Pertanian	1 Bidang	Perhitungan Rumus
23	Pengolahan Data Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstataasi	Tanah Pertanian	1 Bidang	Perhitungan Rumus
24	Pengolahan Data Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstataasi	Tanah Non Pertanian	1 Bidang	Perhitungan Rumus
25	Panitia P3MB	Bidang	1 Bidang	Perhitungan Rumus

No	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/Kategori	Volume	Indeks Biaya
1	2	3	4	5
26	Panitia Pemeriksaan Tanah B	Bidang	1 Bidang	Perhitungan Rumus
27	Informasi Pengecekan Sertipikat	Bidang	1 Bidang	9.500
28	Informasi Data Pendaftaran Tanah Melalui SKPT	Bidang	1 Bidang	11.000
29	Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Sertipikat Swadaya)	Bidang	1 Bidang	10.000
30	Pemeliharaan data Pertanahan	Bidang	1 Bidang	16.000
31	Pemeliharaan data Pertanahan (Pemecahan dan Pemisahan)	Bidang	1 Bidang	16.000
32	Sumpah dan naskah pengumuman untuk Penggantian Blanko Sertifikat	Bidang	1 Bidang	72.000
33	Pemberian Surat Keputusan cuti PPAT oleh Kakanwil	untuk cuti antara 3 sampai dengan 6 bulan	1 SK	41.000
34	Pemberian Surat Keputusan cuti PPAT oleh Kakantah	untuk cuti sampai dengan 3 bulan	1 SK	10.000
35	Sumpah Jabatan sebagai PPAT/paket/5 orang	Sumpah Jabatan sebagai PPAT/paket/5 orang	1 SK	1.985.000
36	Sumpah Jabatan sebagai PPAT Sementara/paket/10 orang	Sumpah Jabatan sebagai PPAT Sementara/paket/10 orang	1 SK	2.135.000
37	Penunjukan sebagai PPAT Sementara/orang	Penunjukan sebagai PPAT Sementara/orang	1 SK	70.000
38	Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A0	Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A0	1 Layanan	90.000
39	Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A1	Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A1	1 Layanan	67.500
40	Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A2	Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A2	1 Layanan	52.000
41	Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A3	Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A3	1 Layanan	38.500
42	Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A4	Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A4	1 Layanan	30.500
43	Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A0	Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A0	1 Layanan	65.000

No	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/Kategori	Volume	Indeks Biaya
1	2	3	4	5
44	Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A1	Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A1	1 Layanan	45.000
45	Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A2	Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A2	1 Layanan	32.000
46	Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A3	Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A3	1 Layanan	19.750
47	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	JAWA TENGAH	1 SP	87.626.000
48	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	JAWA TIMUR	1 SP	92.514.000
49	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	ACEH	1 SP	93.351.000
50	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	SUMATERA UTARA	1 SP	98.694.000
51	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	RIAU	1 SP	91.115.000
52	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	KALIMANTAN BARAT	1 SP	91.158.000
53	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	KALIMANTAN SELATAN	1 SP	97.610.000
54	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	KALIMANTAN TIMUR	1 SP	95.923.000
55	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	SULAWESI UTARA	1 SP	102.146.000
56	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	SULAWESI TENGAH	1 SP	100.782.000
57	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	SULAWESI SELATAN	1 SP	105.952.000
58	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	SULAWESI TENGGARA	1 SP	102.868.000
59	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	MALUKU	1 SP	112.662.000
60	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	NUSA TENGGARA BARAT	1 SP	105.368.000
61	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	NUSA TENGGARA TIMUR	1 SP	108.200.000
62	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data</i>	PAPUA	1 SP	125.972.000

No	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/Kategori	Volume	Indeks Biaya
1	2	3	4	5
	Inventarisasi Wilayah Pesisir			
63	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	BENGKULU	1 SP	97.374.000
64	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	GORONTALO	1 SP	90.978.000
65	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	MALUKU UTARA	1 SP	109.634.000
66	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	KEPULAUAN RIAU	1 SP	103.158.000
67	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	PAPUA BARAT	1 SP	132.450.000
68	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	DKI JAKARTA	1 SP	113.204.000
69	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	JAWA TIMUR	1 SP	128.720.000
70	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	ACEH	1 SP	117.410.000
71	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	SUMATERA BARAT	1 SP	97.664.000
72	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	KALIMANTAN BARAT	1 SP	119.864.000
73	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	SULAWESI UTARA	1 SP	120.868.000
74	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	SULAWESI TENGAH	1 SP	120.999.000
75	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	SULAWESI SELATAN	1 SP	120.996.000
76	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	SULAWESI TENGGARA	1 SP	120.658.000
77	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	MALUKU	1 SP	140.298.000
78	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	BALI	1 SP	152.024.000
79	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	NUSA TENGGARA BARAT	1 SP	120.808.000
80	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	PAPUA	1 SP	161.902.000
81	<i>Output</i> Data WP3WT; <i>Suboutput</i> : Data Inventarisasi Wilayah Pesisir	BANTEN	1 SP	111.718.000

No	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/Kategori	Volume	Indeks Biaya
1	2	3	4	5
82	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	BANGKA BELITUNG	1 SP	117.684.000
83	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	SULAWESI BARAT	1 SP	113.140.000
84	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	KEPULAUAN RIAU	1 SP	121.314.000
85	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i>	PAPUA BARAT	1 SP	158.912.000
86	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Tertentu</i>	JAWA BARAT	1 SP	97.892.000
87	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Tertentu</i>	D.I. YOGYAKARTA	1 SP	116.190.000
88	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Tertentu</i>	JAMBI	1 SP	92.630.000
89	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Tertentu</i>	KALIMANTAN TENGAH	1 SP	104.590.000
90	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i>	JAWA BARAT	1 SP	101.548.000
91	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i>	JAWA TIMUR	1 SP	112.096.000
92	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i>	RIAU	1 SP	88.300.000
93	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i>	LAMPUNG	1 SP	83.286.000
94	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i>	KALIMANTAN SELATAN	1 SP	95.062.000
95	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i>	KALIMANTAN TIMUR	1 SP	109.322.000
96	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i>	SULAWESI UTARA	1 SP	99.308.000
97	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i>	BA	1 SP	125.508.000
98	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i>	PAPUA	1 SP	129.794.000
99	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i>	SULAWESI BARAT	1 SP	93.666.000
100	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i>	JAWA BARAT	1 SP	64.487.000

No	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/Kategori	Volume	Indeks Biaya
1	2	3	4	5
101	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i>	D.I. YOGYAKARTA	1 SP	75.208.000
102	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i>	JAMBI	1 SP	65.855.000
103	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i>	SUMATERA SELATAN	1 SP	81.987.000
104	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i>	LAMPUNG	1 SP	64.861.000
105	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i>	KALIMANTAN TENGAH	1 SP	74.651.000
106	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i>	KALIMANTAN SELATAN	1 SP	73.197.000
107	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i>	KALIMANTAN TIMUR	1 SP	79.745.000
108	<i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i>	BALI	1 SP	90.399.000
109	Sertipikat Konsolidasi Tanah (Swadaya)	Tanah Pertanian	1 Bidang	Perhitungan Rumus
110	Sertipikat Konsolidasi Tanah (Swadaya)	Tanah Non Pertanian	1 Bidang	Perhitungan Rumus

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

SOFYAN A DJALIL

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN
2018

TOTAL BIAYA KELUARAN KEGIATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
1	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Aceh	100.000	Hektar	200.161.000
2	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Jawa Barat	68.000	Hektar	132.844.000
3	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Sumatera Barat	19.000	Hektar	65.385.000
4	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Jawa Tengah	45.000	Hektar	90.002.000
5	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Riau	42.000	Hektar	94.589.000
6	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Jambi	79.000	Hektar	141.726.000
7	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Jawa Timur	86.000	Hektar	166.087.000
8	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Sumatera Selatan	53.000	Hektar	125.014.000
9	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Kalimantan Selatan	112.000	Hektar	201.386.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
10	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Sulawesi Tenggara	58.000	Hektar	123.723.000
11	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Maluku	64.000	Hektar	145.577.000
12	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Nusa Tenggara Barat	30.000	Hektar	81.482.000
13	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Banten	18.000	Hektar	61.487.000
14	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Papua	42.000	Hektar	119.761.000
15	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Kalimantan Barat	81.000	Hektar	145.557.000
16	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Gorontalo	34.000	Hektar	85.708.000
17	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Bangka Belitung	20.000	Hektar	59.982.000
18	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Maluku Utara	60.000	Hektar	125.063.000
19	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Kalimantan Timur	59.000	Hektar	145.277.000
20	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Sulawesi Barat	50.000	Hektar	98.261.000
21	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Papua Barat	35.000	Hektar	106.558.000
22	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Sulawesi Selatan	97.000	Hektar	189.214.000
23	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Bengkulu	43.000	Hektar	99.210.000
24	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Kalimantan Tengah	61.000	Hektar	134.671.000
25	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Lampung	76.000	Hektar	125.105.000
26	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Sulawesi Tengah	75.000	Hektar	150.149.000
27	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Sulawesi Utara	108.000	Hektar	186.480.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
28	Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500	Sumatera Utara	52.000	Hektar	107.079.000
29	Peta Tematik	DKI Jakarta	20.000	Hektar	64.621.000
30	Peta Tematik	Jawa Barat	30.000	Hektar	132.549.600
31	Peta Tematik	Jawa Tengah	20.000	Hektar	91.506.000
32	Peta Tematik	D.I. Yogyakarta	10.000	Hektar	61.792.000
33	Peta Tematik	Jawa Timur	15.000	Hektar	82.420.050
34	Peta Tematik	Aceh	15.000	Hektar	79.434.000
35	Peta Tematik	Sumatera Utara	30.000	Hektar	125.471.100
36	Peta Tematik	Sumatera Barat	15.000	Hektar	79.305.000
37	Peta Tematik	Riau	15.000	Hektar	77.595.000
38	Peta Tematik	Jambi	25.000	Hektar	108.320.500
39	Peta Tematik	Sumatera Selatan	40.000	Hektar	169.332.400
40	Peta Tematik	Lampung	30.000	Hektar	119.525.100
41	Peta Tematik	Kalimantan Barat	40.000	Hektar	162.201.200
42	Peta Tematik	Kalimantan Tengah	20.000	Hektar	100.328.600
43	Peta Tematik	Kalimantan Selatan	30.000	Hektar	126.450.000
44	Peta Tematik	Kalimantan Timur	30.000	Hektar	160.058.100
45	Peta Tematik	Sulawesi Utara	10.000	Hektar	64.277.500
46	Peta Tematik	Sulawesi Tengah	15.000	Hektar	83.554.500
47	Peta Tematik	Sulawesi Selatan	10.000	Hektar	67.507.500
48	Peta Tematik	Sulawesi Tenggara	25.000	Hektar	114.749.500
49	Peta Tematik	Maluku	25.000	Hektar	133.907.000
50	Peta Tematik	Bali	30.000	Hektar	154.904.100
51	Peta Tematik	Nusa Tenggara Barat	40.000	Hektar	167.283.200
52	Peta Tematik	Nusa Tenggara Timur	40.000	Hektar	165.517.200
53	Peta Tematik	Papua	40.000	Hektar	233.052.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
54	Peta Tematik	Bengkulu	10.000	Hektar	64.968.500
55	Peta Tematik	Banten	25.000	Hektar	117.447.000
56	Peta Tematik	Gorontalo	15.000	Hektar	80.631.450
57	Peta Tematik	Bangka Belitung	15.000	Hektar	78.055.500
58	Peta Tematik	Maluku Utara	20.000	Hektar	112.497.000
59	Peta Tematik	Sulawesi Barat	30.000	Hektar	124.290.600
60	Peta Tematik	Kepulauan Riau	20.000	Hektar	97.644.000
61	Peta Tematik	Papua Barat	20.000	Hektar	131.099.000
62	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	DKI Jakarta	1	Kanwil	71.228.600
63	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Jawa Barat	1	Kanwil	226.430.000
64	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Jawa Tengah	1	Kanwil	225.580.000
65	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	D.I. Yogyakarta	1	Kanwil	116.425.000
66	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Jawa Timur	1	Kanwil	122.820.000
67	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Aceh	1	Kanwil	91.745.000
68	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Sumatera Utara	1	Kanwil	147.460.000
69	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Sumatera Barat	1	Kanwil	101.670.000
70	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Riau	1	Kanwil	87.902.000
71	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Jambi	1	Kanwil	196.622.000
72	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Sumatera Selatan	1	Kanwil	142.100.000
73	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Lampung	1	Kanwil	135.870.000
74	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Kalimantan Barat	1	Kanwil	161.490.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
75	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Kalimantan Tengah	1	Kanwil	185.954.000
76	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Kalimantan Selatan	1	Kanwil	138.040.000
77	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Kalimantan Timur	1	Kanwil	272.043.000
78	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Sulawesi Utara	1	Kanwil	167.523.000
79	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Sulawesi Tengah	1	Kanwil	190.604.000
80	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Sulawesi Selatan	1	Kanwil	239.300.000
81	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Sulawesi Tenggara	1	Kanwil	197.670.000
82	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Maluku	1	Kanwil	129.915.000
83	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Bali	1	Kanwil	183.734.200
84	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Nusa Tenggara Barat	1	Kanwil	153.830.000
85	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Nusa Tenggara Timur	1	Kanwil	140.498.000
86	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Papua	1	Kanwil	147.358.000
87	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Bengkulu	1	Kanwil	106.818.000
88	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Banten	1	Kanwil	100.776.000
89	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Gorontalo	1	Kanwil	197.008.000
90	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Bangka Belitung	1	Kanwil	110.790.000
91	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Maluku Utara	1	Kanwil	211.140.000
92	<i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Kepulauan Riau	1	Kanwil	64.500.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
93	Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Sulawesi Barat	1	Kanwil	111.822.000
94	Database Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil)	Papua Barat	1	Kanwil	169.445.000
95	Kegiatan Usaha Bersama	Kategori I (Wilayah I: Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat)	1	Satker	187.042.800
96	Kegiatan Usaha Bersama	Kategori II (Wilayah II: Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau)	1	Satker	161.594.800
97	Kegiatan Usaha Bersama	Kategori III (Wilayah III: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat)	1	Satker	140.357.800
98	Kegiatan Usaha Bersama	Kategori IV (Wilayah IV: Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Gorontalo)	1	Satker	116.177.800
99	Kegiatan Usaha Bersama	Kategori V (Wilayah V: Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta,	1	Satker	94.367.800

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
		Jawa Timur, Bali, Banten)			
100	Layanan Pengaduan (Kantah)	Kantor Pertanahan	1	Kasus	2.558.000
101	Analisa Sengketa/Konflik (Kantah)	Kantor Pertanahan	1	Kasus	10.800.000
102	Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus (Kantah)	Kantor Pertanahan	1	Kasus	2.800.000
103	Layanan Pengaduan (Kanwil)	Kantor Wilayah	1	Kasus	2.558.000
104	Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori I (Kanwil)	Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara	1	Kasus	57.794.000
105	Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori II (Kanwil)	Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kep. Riau, Bangka Belitung	1	Kasus	40.734.000
106	Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori III (Kanwil)	Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo	1	Kasus	60.398.000
107	Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori IV (Kanwil)	Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung	1	Kasus	36.514.000
108	Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori V (Kanwil)	D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali	1	Kasus	36.034.000
109	Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori	DKI Jakarta	1	Kasus	14.070.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
	VI (Kanwil)				
110	Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori VII (Kanwil)	Jawa Barat dan Banten	1	Kasus	30.874.000
111	Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori I (Kanwil)	Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara	1	Kasus	166.834.000
112	Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori II (Kanwil)	Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung	1	Kasus	144.714.000
113	Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori III (Kanwil)	Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo	1	Kasus	178.522.000
114	Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori IV (Kanwil)	Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung	1	Kasus	140.174.000
115	Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori V (Kanwil)	D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali	1	Kasus	148.734.000
116	Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori VI (Kanwil)	DKI Jakarta	1	Kasus	76.660.000
117	Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori VII (Kanwil)	Jawa Barat dan Banten	1	Kasus	143.644.000
118	Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori I (Kantah)	Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara	1	Kasus	65.935.000
119	Penanganan Perkara Tanah	Sulawesi Tengah,	1	Kasus	48.735.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
	dan Ruang Kategori II (Kantah)	Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung			
120	Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori III (Kantah)	Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo	1	Kasus	57.055.000
121	Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori IV (Kantah)	Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung	1	Kasus	48.895.000
122	Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori V (Kantah)	D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali	1	Kasus	47.935.000
123	Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori VI (Kantah)	DKI Jakarta	1	Kasus	18.345.000
124	Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori VII (Kantah)	Jawa Barat dan Banten	1	Kasus	50.015.000
125	Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori I (Kanwil)	Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara	1	Kasus	78.578.000
126	Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori II (Kanwil)	Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung	1	Kasus	58.598.000
127	Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori III (Kanwil)	Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera	1	Kasus	66.675.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
		Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo			
128	Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori IV (Kanwil)	Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung	1	Kasus	56.229.000
129	Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori V (Kanwil)	D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali	1	Kasus	55.209.000
130	Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori VI (Kanwil)	DKI Jakarta	1	Kasus	20.997.000
131	Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori VII (Kanwil)	Jawa Barat dan Banten	1	Kasus	53.755.000
132	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Aceh	Aceh	950	Hektar	98.498.850
133	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Bengkulu	Bengkulu	2.850	Hektar	84.425.000
134	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Gorontalo	Gorontalo	600	Hektar	24.640.200
135	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	1.000	Hektar	28.095.000
136	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	5.900	Hektar	301.242.200
137	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	200	Hektar	19.753.800
138	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	510	Hektar	22.897.150
139	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Maluku Utara	Maluku Utara	1.056	Hektar	93.454.944
140	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	950	Hektar	96.290.100
141	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur	300	Hektar	55.254.900
142	Sertipikat Hak Pengelolaan	Riau	197	Hektar	29.277.333

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
	Provinsi Riau				
143	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	1.016	Hektar	62.845.000
144	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	3.453	Hektar	240.380.000
145	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	950	Hektar	41.278.450
146	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	370	Hektar	55.804.880
147	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	1.007	Hektar	94.934.925
148	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	901	Hektar	69.699.400
149	Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	1.030	Hektar	27.275.000
150	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Aceh	Aceh	1	Satker	133.152.000
151	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Bangka Belitung	Bangka Belitung	1	Satker	123.440.000
152	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Bali	Bali	1	Satker	178.935.000
153	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Banten	Banten	1	Satker	142.886.000
154	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Bengkulu	Bengkulu	1	Satker	138.088.000
155	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	1	Satker	128.141.000
156	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Gorontalo	Gorontalo	1	Satker	151.118.000
157	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1	Satker	139.985.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
158	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Jambi	Jambi	1	Satker	120.410.000
159	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Jawa Tengah	Jawa Tengah	1	Satker	116.650.000
160	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur	1	Satker	122.681.000
161	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	1	Satker	133.576.000
162	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	1	Satker	144.560.000
163	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	1	Satker	127.738.000
164	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	1	Satker	167.291.000
165	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kepulauan Riau	Kep. Riau	1	Satker	125.866.000
166	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Lampung	Lampung	1	Satker	127.406.000
167	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Maluku Utara	Maluku Utara	1	Satker	144.080.000
168	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Maluku	Maluku	1	Satker	155.184.000
169	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	1	Satker	143.215.000
170	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur	1	Satker	136.245.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
171	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Papua Barat	Papua Barat	1	Satker	187.765.000
172	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Papua	Papua	1	Satker	217.550.000
173	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Riau	Riau	1	Satker	114.350.000
174	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	1	Satker	109.484.000
175	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	1	Satker	156.145.000
176	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	1	Satker	125.342.000
177	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	1	Satker	123.416.000
178	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	1	Satker	136.450.000
179	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	1	Satker	113.540.000
180	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	1	Satker	127.890.000
181	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	1	Satker	121.250.000
182	Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta	1	Satker	119.770.000
183	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Aceh Utara Provinsi Aceh	Aceh	80.000	Hektar	359.040.000
184	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Bangka	Sumatera Utara	80.000	Hektar	355.200.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
	Selatan Provinsi Sumatera Utara				
185	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu	Bengkulu	69.000	Hektar	319.884.000
186	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Gorontalo Provinsi Gorontalo	Gorontalo	89.000	Hektar	386.616.000
187	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kerinci Provinsi Jambi	Jambi	100.000	Hektar	432.300.000
188	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	80.000	Hektar	367.040.000
189	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	70.000	Hektar	322.840.000
190	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	80.000	Hektar	399.840.000
191	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kapuas Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	50.000	Hektar	292.500.000
192	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Tulang Bawang Provinsi Lampung	Lampung	100.000	Hektar	411.400.000
193	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Seram Bagian Timur Provinsi Maluku	Maluku	10.000	Hektar	98.720.000
194	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara	Maluku Utara	10.000	Hektar	95.490.000
195	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	94.000	Hektar	469.812.000
196	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur	105.000	Hektar	498.120.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
197	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat	Papua Barat	6.000	Hektar	101.946.000
198	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Jaya Wijaya Provinsi Papua	Papua	15.000	Hektar	152.490.000
199	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Siak Provinsi Riau	Riau	80.000	Hektar	342.640.000
200	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	54.000	Hektar	274.482.000
201	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	64.000	Hektar	311.616.000
202	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	40.000	Hektar	216.640.000
203	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	30.000	Hektar	168.390.000
204	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	80.000	Hektar	358.800.000
205	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	70.000	Hektar	351.960.000
206	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Labuhan Batu Provinsi Kepulauan Riau	Kep. Riau	64.000	Hektar	305.372.000
207	Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Labuhan Batu Provinsi Bangka Belitung	Bangka Belitung	15.000	Hektar	89.700.000
208	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Aceh	Aceh	800	Bidang	319.720.000
209	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Bali	Bali	900	Bidang	460.305.000
210	Pembaruan Peta Zona Nilai	Bangka Belitung	700	Bidang	266.245.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
	Tanah Provinsi Bangka Belitung				
211	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Banten	Banten	800	Bidang	339.560.000
212	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Bengkulu	Bengkulu	800	Bidang	322.824.000
213	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Gorontalo	Gorontalo	500	Bidang	201.675.000
214	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	2.600	Bidang	1.095.510.000
215	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Jambi	Jambi	900	Bidang	347.895.000
216	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Jawa Tengah	Jawa Tengah	3.500	Bidang	1.308.475.000
217	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur	3.800	Bidang	1.571.490.000
218	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	600	Bidang	247.110.000
219	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	800	Bidang	317.800.000
220	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	300	Bidang	127.845.000
221	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	1.000	Bidang	528.850.000
222	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kepulauan Riau	Kep. Riau	500	Bidang	202.875.000
223	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Lampung	Lampung	700	Bidang	257.467.000
224	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Maluku Utara	Maluku Utara	600	Bidang	277.950.000
225	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Maluku	Maluku	400	Bidang	191.860.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
226	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	900	Bidang	384.165.000
227	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur	400	Bidang	168.700.000
228	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Papua Barat	Papua Barat	400	Bidang	236.900.000
229	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Papua	Papua	400	Bidang	249.700.000
230	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Riau	Riau	500	Bidang	190.525.000
231	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	500	Bidang	192.695.000
232	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	1.700	Bidang	732.275.000
233	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	800	Bidang	340.296.000
234	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	600	Bidang	245.610.000
235	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	700	Bidang	276.535.000
236	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	1.400	Bidang	546.350.000
237	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	1.100	Bidang	473.825.000
238	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	1.900	Bidang	749.075.000
239	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	500	Bidang	229.575.000
240	Peningkatan Ketrampilan	Aceh	1	Satker	241.021.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
	Penilai Tanah Provinsi Aceh				
241	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Bangka Belitung	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Bangka Belitung	1	Satker	217.218.000
242	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Bengkulu	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Bengkulu	1	Satker	233.623.000
243	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Gorontalo	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Gorontalo	1	Satker	269.138.000
244	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Jambi	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Jambi	1	Satker	209.662.000
245	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kalimantan Barat	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kalimantan Barat	1	Satker	229.083.000
246	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kalimantan Tengah	1	Satker	222.734.000
247	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kepulauan Riau	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kepulauan Riau	1	Satker	217.844.000
248	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Maluku Utara	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Maluku Utara	1	Satker	266.780.000
249	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Satker	248.861.000
250	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Papua	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Papua	1	Satker	370.656.000
251	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi	Peningkatan Ketrampilan Penilai	1	Satker	346.671.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
	Papua Barat	Tanah Provinsi Papua Barat			
252	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Riau	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Riau	1	Satker	206.133.000
253	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Barat	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Barat	1	Satker	212.397.000
254	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Tengah	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Tengah	1	Satker	232.257.000
255	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Satker	224.826.000
256	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Utara	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Utara	1	Satker	250.266.000
257	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sumatera Barat	Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sumatera Barat	1	Satker	205.268.000
258	Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Gorontalo	Gorontalo	1	Provinsi	244.670.000
259	Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Maluku Utara	Maluku Utara	1	Provinsi	259.850.000
260	Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur	1	Provinsi	214.810.000
261	Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Sulawesi	Sulawesi Tengah	1	Provinsi	206.025.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
	Tengah				
262	Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	1	Provinsi	215.390.000
263	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Aceh	Aceh	1	Dokumen	11.448.000
264	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Bangka Belitung	Bangka Belitung	1	Dokumen	9.770.000
265	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Bali	Bali	1	Dokumen	14.660.000
266	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Banten	Banten	1	Dokumen	11.564.000
267	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Bengkulu	Bengkulu	1	Dokumen	11.068.000
268	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta	1	Dokumen	600.000
269	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Gorontalo	Gorontalo	1	Dokumen	12.322.000
270	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1	Dokumen	11.350.000
271	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Jambi	Jambi	1	Dokumen	10.390.000
272	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka	Jawa Tengah	1	Dokumen	9.720.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
	Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Tengah				
273	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur	1	Dokumen	11.134.000
274	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	1	Dokumen	12.164.000
275	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	1	Dokumen	10.680.000
276	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	1	Dokumen	12.742.000
277	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	1	Dokumen	20.564.000
278	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kepulauan Riau	Kep. Riau	1	Dokumen	10.654.000
279	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Lampung	Lampung	1	Dokumen	9.416.000
280	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Maluku	Maluku	1	Dokumen	17.396.000
281	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Maluku Utara	Maluku Utara	1	Dokumen	16.500.000
282	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	1	Dokumen	11.360.000
283	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka	Nusa Tenggara	1	Dokumen	11.510.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
	Pengadaan Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Timur			
284	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Papua Barat	Papua Barat	1	Dokumen	26.460.000
285	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Papua	Papua	1	Dokumen	27.260.000
286	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Riau	Riau	1	Dokumen	10.440.000
287	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	1	Dokumen	10.274.000
288	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	1	Dokumen	12.050.000
289	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	1	Dokumen	12.472.000
290	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	1	Dokumen	11.614.000
291	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	1	Dokumen	10.640.000
292	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	1	Dokumen	10.220.000
293	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	1	Dokumen	17.190.000
294	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka	Sumatera Utara	1	Dokumen	11.040.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
	Pengadaan Tanah Provinsi Sumatera Utara				
295	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi D.I. Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	1	Dokumen	12.694.000
296	Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah dan Hak Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Kategori I	Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	1	Satker	126.611.000
297	Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah dan Hak Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Kategori II	Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara	1	Satker	104.383.000
298	Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah dan Hak Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Kategori III	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan	1	Satker	99.709.000
299	Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah dan Hak Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Kategori IV	Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali	1	Satker	97.489.000
300	Usulan Persetujuan Pemberian/Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan tanah Pemerintah	Usulan Izin/Persetujuan	1	Usulan Izin/ Persetujuan	1.881.000
301	Usulan Penertiban Pelanggaran Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hak Pengelolaan/Pemanfaatan	Usulan Penertiban	1	Usulan Penertiban	2.472.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
	Tanah Pemerintah				
302	Monitoring Perubahan Penggunaan Tanah Kategori I	Kep. Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	1	Kecamatan	18.960.000
303	Monitoring Perubahan Penggunaan Tanah Kategori II	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka, Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara	1	Kecamatan	17.500.000
304	Inventarisasi Tanah Negara Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis Kategori I	Wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara	1	Satuan Pekerjaan	50.500.000
305	Inventarisasi Tanah Negara Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis Kategori II	Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan	1	Satuan Pekerjaan	39.200.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
		dan Sulawesi Tenggara			
306	Inventarisasi Tanah Negara Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis Kategori III	Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera utara, Sumatera barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung	1	Satuan Pekerjaan	36.650.000
307	Inventarisasi Tanah Negara Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis Kategori IV	Wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali	1	Satuan Pekerjaan	41.250.000
308	Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (1 - 250 Ha)	Luasan 1 - 250 Ha	1	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan	1.335.000
309	Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (250 - 500 Ha)	Luasan 250 - 500 Ha	1	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan	2.135.000
310	Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (500 - 1000 Ha)	Luasan 500 -1000 Ha	1	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan	3.795.000
311	Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (1000 - 2500 Ha)	Luasan 1000 - 2500 Ha	1	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan	7.825.000
312	Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (2500 - 5000 Ha)	Luasan 2500 - 5000 Ha	1	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan	19.900.000
313	Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (5000 - 7500 Ha)	Luasan 5000 - 7500 Ha	1	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan	24.775.000
314	Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (7500 -	Luasan 7500 - 10000 Ha	1	Risalah Pertimbangan Teknis	32.775.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume	Total Biaya	
1	2	3	4	5	
	10000 Ha)			Pertanahan	
315	Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (10000 - 15000 Ha)	Luasan 10000 - 15000 Ha	1	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan	40.850.000
316	Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (> 15000 Ha)	Luasan > 15000 Ha	1	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan	40.850.000
317	Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (1 - 5000 m)	Luasan < 5000 M ²	1	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan	240.000
318	Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (5000 - 10000 m)	Luasan 5000 - 10000 M ²	1	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan	280.000
319	Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah	DKI Jakarta	1	Provinsi	1.546.750.000
320	Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah	Jawa Barat	1	Provinsi	2.532.383.000
321	Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah	Jawa Tengah	1	Provinsi	2.830.533.000
322	Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah	D.I. Yogyakarta	1	Provinsi	1.488.502.000
323	Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah	Jawa Timur	1	Provinsi	3.044.748.000
324	Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah	Aceh	1	Provinsi	2.238.553.000
325	Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah	Sumatera Utara	1	Provinsi	2.315.989.000
326	Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah	Sumatera Barat	1	Provinsi	1.876.433.000
327	Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah	Riau	1	Provinsi	1.773.012.000
328	Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah	Jambi	1	Provinsi	1.662.149.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume	Total Biaya
1	2	3	4	5
329	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Sumatera Selatan	1 Provinsi	1.812.390.000
330	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Lampung	1 Provinsi	1.802.406.000
331	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Kalimantan Barat	1 Provinsi	1.919.537.000
332	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Kalimantan Tengah	1 Provinsi	2.086.087.000
333	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Kalimantan Selatan	1 Provinsi	1.962.709.000
334	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Kalimantan Timur	1 Provinsi	2.341.872.000
335	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Sulawesi Utara	1 Provinsi	1.978.442.000
336	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Sulawesi Tengah	1 Provinsi	1.804.278.000
337	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Sulawesi Selatan	1 Provinsi	2.364.432.000
338	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Sulawesi Tenggara	1 Provinsi	1.895.921.000
339	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Maluku	1 Provinsi	1.912.683.000
340	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Bali	1 Provinsi	1.772.050.000
341	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Nusa Tenggara Barat	1 Provinsi	1.698.516.000
342	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Nusa Tenggara Timur	1 Provinsi	1.880.368.000
343	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Papua	1 Provinsi	3.210.652.000
344	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Bengkulu	1 Provinsi	1.641.855.000
345	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Banten	1 Provinsi	1.624.367.000
346	Gugus Tugas Agraria Daerah Reforma	Gorontalo	1 Provinsi	1.585.779.000

No.	Output/Suboutput/ Pekerjaan	Wilayah/Zona/ Kategori	Volume		Total Biaya
1	2	3	4		5
347	Gugus Tugas Agraria Daerah Reformasi	Bangka Belitung	1	Provinsi	1.577.915.000
348	Gugus Tugas Agraria Daerah Reformasi	Maluku Utara	1	Provinsi	1.881.576.000
349	Gugus Tugas Agraria Daerah Reformasi	Sulawesi Barat	1	Provinsi	1.506.842.000
350	Gugus Tugas Agraria Daerah Reformasi	Kep. Riau	1	Provinsi	1.611.635.000
351	Gugus Tugas Agraria Daerah Reformasi	Papua Barat	1	Provinsi	2.122.492.000

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

SOFYAN A DJALIL